

Konsili Trente: Upaya Gereja Katolik Menjawab Tantangan Martin Luther

Irenius Bima Abdiono

Filsafat Keilahian, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana

bimairenius@gmail.com

Marsianus

Filsafat Keilahian, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana

marsianusmerakai@gmail.com

Valentino Candra Ului Making

Filsafat Keilahian, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana

tinomaking88@gmail.com

Abstrak

Fokus pembahasan ini adalah mendalami upaya Gereja Katolik dalam menjawab tantangan Martin Luther berdasarkan Konsili Trente. Gereja berada dalam situasi yang bobrok, dimana banyak terjadi penyimpangan dalam kehidupan Gereja. Martin Luther hadir sebagai reformator, dengan mengeluarkan 95 dalil atau tesis, yang berisi penolakan terhadap doktrin, teologi dan otoritas dalam Gereja. Ia juga mengkritik cara hidup para imam yang haus akan hal-hal duniawi. Gereja melalui konsili Trente berusaha menjawab tantangan dari Martin Luther dan melakukan reformasi internal. Untuk memperdalam pembahasan ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif berupa studi kepustakaan dengan merujuk sumber-sumber seperti buku dan artikel. Tujuannya adalah mengetahui ajaran-ajaran yang diluruskan oleh Gereja dalam menanggapi tantangan Martin Luther. Dari hal ini, penulis menemukan bahwa Gereja mempunyai sikap yang terbuka terhadap kritikan Luther. Gereja menyadari ada banyak kelemahan yang muncul dalam tubuh Gereja, dan untuk itu Gereja melakukan pembaharuan. Namun demikian, Gereja tetap mempertahankan doktrin dan pengajaran imannya, dengan *menolak sola scriptura, sola gratia dan sola fidei*.

Kata Kunci: Konsili Trente, Martin Luther, Reformasi, Moral, Doktrin,

Abstract

The focus of this discussion is to explore the Catholic Church's efforts to answer Martin Luther's challenge based on the Council of Trent. The Church was in a dilapidated situation, where there were many irregularities in the life of the Church. Martin Luther came as a reformer, by issuing 95 propositions or theses, which contained a rejection of doctrine, theology and authority in the Church. He also criticized the lives of priests who were thirsty for worldly things. The Church through the Council of Trent tried to answer the challenge of Martin Luther and carry out internal reforms. To deepen this discussion, the author uses a descriptive qualitative method in the form of a literature study by referring to sources such as books and articles. The aim is to find out the teachings that were straightened out by the Church in response to Martin Luther's challenge. From this, the author finds that the Church has an open attitude towards Luther's criticism. The Church realized that there were many weaknesses that arose within the Church, and for this reason the Church carried out reforms. However, the Church still maintains its doctrine and teaching of faith, rejecting *sola scriptura, sola gratia and sola fidei*.

Keywords: Council of Trent, Martin Luther, Reformation, Morals, Doctrine.

PENDAHULUAN

Pada awal abad ke-16, Reformasi Protestan menguncang fondasi Gereja Katolik. Luther sebagai tokoh reformator kala itu, tampil menentang berbagai praktik gereja. Ia menentang terkait penjualan indulgensi, yang dianggap menyimpang dari ajaran kitab suci dan merugikan umat beriman. Senada dengan ini Kristiyanto mengungkapkan bahwasanya Luther mengklaim tindakan atau praktik yang terjadi dalam tubuh Gereja merusak inti ajaran Yesus (Kristiyanto, 2009).

Melalui 95 dalil atau tesisnya, Luther tidak hanya mengkritik praktik-praktik korupsi yang terjadi dalam Gereja, tetapi juga menawarkan pandangan baru terkait relasi manusia dengan Allah. Di samping itu, Kristiyanto mengemukakan bahwa dalam sembilan puluh lima dalil yang dikeluarkan Luther, Luther mengedepankan pernyataan-pernyataan dogmatis dan pastoral, yang pada prinsipnya berasal dari refleksi Luther yang mendalam atas surat santo Paulus kepada jemaat di Roma (Kristiyanto, 2009).

Dalam hal ini, Reformasi yang digerakkan Luther memicu perpecahan yang besar dalam tubuh kekristenan Barat. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, banyak pengikut Luther dan tokoh-tokoh lainnya, seperti Ulrich Zwingli dan John Calvin memisahkan diri dari Gereja Katolik (Rukmana & Mareta, 2022). Mereka mulai mendirikan Gereja sendiri. Di beberapa wilayah Eropa, terutama di Jerman dan Swiss, Reformasi memperoleh dukungan politik dari para penguasa lokal yang ingin memerdekakan diri dari kendali Roma. Sebagaimana diungkapkan oleh Kristiyanto bahwa banyak penduduk di wilayah Eropa yang sadar akan sikap nasionalisme sehingga muncul negara-negara nasional (Kristiyanto, 2009).

Selain masalah doktrinal, Krisis gereja juga disebabkan oleh masalah internal (Tinambunan, 2017). Gereja pada saat itu berada dalam situasi yang kelim. Gereja yang seharusnya menjadi bait Suci, ternodai oleh nepotisme, seks, serta kerakusan duniawi. Para uskup dan Paus hidup dalam gaya hidup yang mewah dan glamor. Hal ini semakin mencederai tubuh gereja sehingga umat kehilangan kepercayaan terhadap Gereja. Menurut Luther praktik ini sungguh tidak mencerminkan corak hidup Gereja yang ideal sebagai sebuah bait Allah, yang suci, benar dan kudus. Melalui ajarannya, Luther menekankan pentingnya *sola fidei* (hanya dengan iman) dan *sola scriptura* (hanya Kitab Suci sebagai sumber kebenaran) (Rukmana & Mareta, 2022). Ajaran Luther ini secara terang-terangan menentang otoritas gereja dan tradisi Katolik.

Untuk menghadapi situasi dan tantangan ini, Gereja katolik menyadari bahwa sangat penting untuk mengadakan reformasi internal dan klarifikasi terkait berbagai ajaran Gereja Katolik. Namun demikian, upaya untuk mengadakan reformasi internal dan klarifikasi terkait ajaran Gereja tidak semudah dan secepat yang diwacanakan, sebab adanya perbedaan pendapat dikalangan petinggi Gereja. Sebagian uskup dan kardinal mendorong reformasi radikal, namun sebagian lain khawatir bahwa reformasi yang akan diadakan justru memperlemah otoritas paus (Eddy, 2008). Di samping itu, Budiman mengemukakan bahwa adanya persaingan antara Kekaisaran Romawi dan kerajaan-kerajaan besar seperti Prancis juga memperlambat Reformasi yang telah direncanakan Gereja (Budiman, 2006).

Setelah menghadapi berbagai persoalan yang rumit dan panjang dan beberapa kali penundaan akibat masalah politik dan ketegangan antara paus dan para elit Eropa, akhirnya Gereja berhasil mewujudkan reformasi dari dalam. Secara definitif, reformasi ini termaktub dalam Konsili Trente. Konsili Trente berhasil diselenggarakan di kota Trento, Italia Utara (Budiman, 2006). Dalam konsili ini ada tiga paus berbeda yang memimpin di setiap tahap konsili, yakni Paulus III, Yulius III, dan Pius IV (Alister, 1997). Hal ini terjadi karena konsili Trente berlangsung selama hampir dua dekade. Adapun tujuan dari konsili ini adalah untuk menjawab dan menanggapi ajaran-ajaran Reformasi Protestan serta menegaskan kembali ajaran Katolik secara lebih jelas dan tegas (Eddy, 2008). Secara keseluruhan, konsili Trente menjadi tonggak sejarah yang menandai akhir dari era ketidakstabilan Gereja Katolik (Eddy, 2008). Konsili ini juga menjadi momentum reformasi besar-besaran dari dalam tubuh Gereja. Meskipun konsili ini tidak berhasil menyatukan kekristenan sebagaimana diawal, namun konsili berhasil mempertegas identitas Gereja Katolik yang berbeda dari Protestan. Melalui konsili ini otoritas paus juga semakin kuat sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Dengan latar belakang ini, Konsili Trente dapat dipahami sebagai usaha Gereja Katolik untuk merespons tantangan Martin Luther dan Reformasi Protestan, sekaligus memperbaharui diri dan memperbaiki kelemahan internalnya (Alister, 1997). Melalui konsili ini, gereja bukan hanya bertahan dari krisis besar tetapi juga muncul dengan identitas dan semangat baru yang mempengaruhi wajah Katolikisme hingga berabad-abad kemudian. Atas dasar ini, maka akan dibahas tentang: a). apa saja penegasan yang dikemukakan Gereja melalui Konsili Trente dan, b). apa dampak Konsili Trente bagi perkembangan dan hidup Gereja?

KAJIAN TEORI

Reformasi Protestan yang diprakarsai oleh Martin Luther pada abad ke-16 muncul sebagai reaksi terhadap penyimpangan moral dan struktural dalam Gereja Katolik (Eddy, 2008). Luther mengkritik praktik korupsi dalam Gereja, seperti penjualan indulgensi, serta gaya hidup para imam dan pemimpin Gereja yang dianggap duniawi dan tidak mencerminkan kesucian iman Kristiani (Alister, 1997). Melalui 95 dalilnya, Luther menawarkan

prinsip-prinsip seperti *sola fide* (keselamatan hanya melalui iman), *sola scriptura* (Kitab Suci sebagai satu-satunya otoritas kebenaran), dan menolak tradisi Gereja yang dianggap tidak sesuai dengan Kitab Suci (Kristiyanto, 2009). Kritik Luther ini memicu perpecahan besar dalam Kekristenan Barat, sehingga Gereja Katolik menyadari perlunya reformasi internal untuk menjawab tantangan tersebut.

Sebagai respons terhadap situasi ini, Konsili Trente (1545-1563) menjadi tonggak penting reformasi Gereja Katolik. Konsili ini menegaskan kembali ajaran-ajaran Gereja sambil melakukan pembaharuan internal, termasuk pembenahan moral para imam, pendirian seminari, dan penegasan kembali doktrin Katolik (Eddy, 2008). Gereja menolak prinsip *sola fide* dengan menyatakan bahwa keselamatan adalah hasil sinergi antara rahmat Allah dan perbuatan baik. Demikian pula, *sola scriptura* ditolak dengan menekankan bahwa Kitab Suci dan Tradisi suci memiliki otoritas yang setara sebagai wahyu ilahi. Konsili Trente juga memperkuat peran *Magisterium* sebagai otoritas pengajaran Gereja yang sah dan menegaskan tujuh sakramen sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan iman (Tinambunan, 2017). Melalui upaya ini, Gereja tidak hanya memperbaiki kelemahan internal, tetapi juga mempertahankan identitas Katolik di tengah guncangan Reformasi Protestan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan Konsili Trente dan upaya Gereja Katolik dalam merespons tantangan Martin Luther. Data-data yang dikumpulkan meliputi pemikiran Martin Luther yang tertuang dalam 95 tesis, dokumen-dokumen Konsili Trente, serta pandangan para ahli teologi dan sejarah Gereja Katolik. Melalui metode ini, penulis berupaya mendeskripsikan upaya reformasi internal Gereja, penegasan kembali ajaran, dan perbaikan moral serta pendidikan rohani yang dilakukan oleh Gereja Katolik.

Dalam proses penelitian ini, data dianalisis secara sistematis dengan langkah-langkah sebagai berikut: pertama, mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi Gereja Katolik akibat kritik Martin Luther; kedua, mengumpulkan sumber-sumber primer dan sekunder yang membahas Konsili Trente dan reformasi Gereja Katolik; ketiga, menganalisis serta menginterpretasi respons Gereja terhadap ajaran *sola fide*, *sola scriptura*, dan kritik terkait sistem sakramental serta kehidupan moral para pemimpin Gereja; dan terakhir, menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak Konsili Trente terhadap pembaharuan internal Gereja Katolik serta perannya dalam mempertahankan identitas dan doktrin Gereja di tengah tantangan Reformasi Protestan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reformasi Internal Gereja Katolik

Reformasi internal Gereja Katolik muncul sebagai respon terhadap berbagai tantangan akibat Reformasi Protestan. Reformasi ini mencakup perhatian terhadap krisis moral di kalangan imam dan uskup serta adanya penurunan mutu pendidikan rohani (Rukmana & Mareta, 2022). Gereja merasa perlu memperhatikan dan memperbaiki kelemahan internal agar dapat memulihkan wibawa dan pengaruh spiritual di tengah masyarakat Eropa yang mengalami perpecahan. Karena itu, dua aspek ditekankan dalam reformasi internal ini adalah pembenahan moral dan disiplin rohani para pemimpin gereja serta pendirian seminari untuk meningkatkan kualitas Pendidikan calon imam (Eddy, 2008).

Pertama, pembenahan moral dan disiplin rohani para pemimpin gereja. Pembenahan moral dan disiplin rohani para imam dan uskup menjadi salah satu prioritas dalam reformasi internal Gereja Katolik. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyak imam dan uskup yang masuk dalam praktik korupsi, seperti penjualan indulgensi dan jabatan (Alister, 1997). Selain itu, para imam, uskup dan paus hidup menurut kesenangan duniawinya. Mereka melanggar kaul dan tidak menjalankan tugas pastoral dengan baik. Karena itu, dalam Konsili Trente ditekankan perlunya peningkatan spiritualitas disiplin rohani, kewajiban hidup selibat dan memperketat pengawasan terhadap kehidupan iman dan uskup. Konsili Trente menegaskan bahwa para uskup diwajibkan tinggal di keuskupan masing-masing dengan harapan lebih aktif melayani umat secara langsung (Budiman, 2006).

Kedua, pendirian seminari untuk meningkatkan kualitas pendidikan calon imam (Alister, 1997). Melalui konsili Trente para imam dan uskup diajak untuk berkerjasama dalam mendirikan seminari-seminari sebagai

sebuah lembaga khusus bagi pendidikan bagi calon imam atau rohaniwan. Pendirian seminari bermaksud supaya para calon imam mendapat pendidikan teologis, filsafat dan keterampilan pastoral yang sistematis (Eddy, 2008). Karena itu, setiap keuskupan diharuskan mempunyai seminari untuk memastikan bahwa calon imam mengerti dan memahami ajaran Gereja dengan benar, serta mempunyai semangat pelayanan yang integral.

Disamping itu, pendirian seminari-seminari dimaksudkan supaya dapat membentuk spiritualitas yang mendalam dan karakter moral yang unggul bagi para calon imam. Dalam lingkungan seminari, para calon imam dilatih untuk berdoa, meditasi, hidup selibat, berpastoral serta menjalankan latihan rohani guna memperkuat kedisiplinan pribadi (Simbolon, 2008). Dengan demikian, Gereja berharap dapat membentuk imam-imam yang tidak hanya mempunyai dalam bidang intelektual, tetapi juga mempunyai integritas moral, kematangan emosional dan memiliki komitmen spiritual yang tinggi.

Secara definitif, reformasi gereja katolik melalui pembenahan moral dan pendirian seminari-seminari berdampak besar pada perkembangan Gereja selanjutnya. Hal ini berhasil mengembalikan citra dan efektivitas pelayanan pastoral Gereja di tengah kehidupan masyarakat. Walaupun reformasi ini mendapat tantangan dan penolakan di berbagai tempat, namun reformasi ini berhasil menciptakan fondasi yang kokoh bagi perbaikan kehidupan Gereja dalam jangka panjang (Mawikere, 2017). Reformasi ini juga memperkokoh posisi Gereja di tengah perkembangan dunia yang semakin kompleks dan kritis. Hingga pada tahap ini, prinsip-prinsip yang dikemukakan atau diperkenalkan melalui reformasi dari dalam, tetap relevan dan diterapkan dalam pembinaan dan pendidikan rohani di dalam Gereja Katolik.

Penegasan Ajaran Gereja Katolik

Gereja Katolik di abad pertengahan mengalami guncangan hebat akibat Reformasi yang dipelopori oleh Martin Luther. Dalam reformasinya, Martin Luther menyuarakan ajaran *sola fidei* dan *sola scriptura* (Noll, 1978). Ajaran ini menyatakan bahwa keselamatan hanya bisa didapatkan melalui iman semata (*sola fidei*), dan Kitab Suci dalam hal ini adalah satu-satunya otoritas tertinggi dalam hal kepercayaan. Terkait dua prinsip ini, Gereja Katolik menolaknya, dan mempertahankan bahwa iman dan tindakan harus seimbang guna mencapai keselamatan (Budiman, 2006). Disamping itu, Gereja Katolik menegaskan bahwa tradisi dalam sejarah Gereja mempunyai peran yang vital bersama Kitab Suci dalam menentukan ajaran iman.

Gereja Katolik menolak ajaran *sola fidei* dengan menyatakan bahwa keselamatan tidak dapat hanya bergantung pada iman semata, tetapi juga harus diikuti oleh perbuatan baik (Alister, 1997). Gereja Katolik menyatakan bahwa keselamatan merupakan suatu proses yang melibatkan sinergisitas antara rahmat Allah dan tanggapan aktif dari manusia (Mawikere, 2017). Pandangan ini dilandasi oleh ajaran Gereja Katolik yang mengatakan bahwa perbuatan baik yang dibimbing oleh iman, adalah perwujudan dari iman itu sendiri dan bukan sekadar hasil tambahan. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan dalam Surat Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati (bdk. Yak 2:26).

Sedangkan penolakan pada *sola scriptura* didasari pada keyakinan bahwa Kitab Suci dan tradisi merupakan dua hal yang berjalan beriringan. Sebagaimana diungkapkan oleh Alister bahwa Kitab suci tidak dapat dilihat sebagai satu-satunya pernyataan; tradisi merupakan suatu pelengkap vital (Alister, 1997). Karena itu, Gereja katolik menjadikan Kitab suci dan tradisi sebagai otoritas tertinggi. Gereja Katolik percaya bahwa tradisi suci merupakan bentuk pewarisan dan praktik yang berasal dari Yesus Kristus yang kemudian diteruskan kepada para rasul dan Gereja. Secara jelas hal ini termuat dalam 1Kor 11:23a: “Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan”). Paulus menekankan bahwa iman kristiani adalah iman yang berdasarkan tradisi, yang diteruskan dari Jemaat Perdana di Galilea dan Yudea hingga ke berbagai suku bangsa (jemaat-jemaat yang didirikan oleh Paulus). Dengan kata lain, ajaran yang disampaikan secara lisan namun tidak tercatat dalam Kitab Suci dianggap juga sebagai kebenaran ilahi (Eddy, 2008). Melalui ajaran ini, Gereja Katolik menegaskan bahwa Kitab Suci dan tradisi memiliki otoritas yang sama, dan keduanya adalah wahyu yang dianugerahkan Allah kepada umat manusia.

Dalam upaya memperkokoh otoritas tradisi dan Kitab suci, Gereja juga menegaskan pentingnya Magisterium. Magisterium merupakan sebuah otoritas pengajaran resmi Gereja Katolik yang dipengang oleh Paus dan Uskup (Murniat et al., 2021). Magisterium berperan dalam menafsirkan Kitab Suci, tradisi, dan memberikan panduan spiritual dan moral bagi umat Katolik. Gereja Katolik percaya bahwa Magisterium berfungsi sebagai penjamin dan pelindung ajaran yang benar. Hal ini secara definitif membuat umat Katolik dapat mengikuti ajaran yang

benar dan murni tanpa salah tafsir. Oleh karena itu, umat Katolik diwajibkan untuk menghormati Kitab Suci dan tradisi, serta menerima ajaran Gereja sebagai patokan iman dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain menegaskan tentang otoritas kitab suci dan tradisi, reformasi internal Gereja Katolik juga melibatkan redefinisi tentang sakramen. Hal ini dilatarbelakangi oleh risalah Luther dalam Pembuangan Babel untuk Gereja:

Sementara itu, telah tampak bahwa adalah benar untuk membatasi istilah sakramen untuk janji-janji Allah itu yang mempunyai tanda-tan yang dilekatkan pada mereka, sisinya tidak dihubungkan dengan tanda-tanda, hanya janji-janji saja. Sebab itu, hanya ada dua sakramen di dalam gereja Allah: baptisan dan roti. Karena hanya dalam dua sakramen inilah kita menemukan tanda yang dilembagakan secara ilahi dan janji akan pengampunan dosa (Alister, 1997).

Dari risalah ini Luther memperjelas bahwa penebusan dosa (Sakramen Tobat) tidak lagi mempunyai status sakramental, karena kedua ciri esensial dari suatu sakramen adalah firman dan suatu tanda yang bersifat lahiriah atau dapat dilihat (seperti air dalam baptisan dan roti serta anggur dalam ekaristi).

Dalam kanon (peraturan) yang dikeluarkan pada 3 Maret 1547, Gereja Katolik menegaskan:

Bila seseorang berkata bahwa sakramen-sakramen dari hukum yang baru itu semuanya tidak diperintahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, atau bahwa ada lebih atau kurang dari yang tujuh itu, yaitu baptisan, Konfirmasi (Krisma), Ekaristi, Pennebusan dosa (Tobat), pengurapan orang sakit, penahbisan dan perkawinan atau bahwa salah satu dari ketujuh sakramen ini bukan benar-benar dan pada hakikatnya suatu sakramen, terkutuklah mereka (Alister, 1997).

Gereja Katolik menetapkan tujuh sakramen dalam Gereja, yakni sakramen Baptis, Ekaristi, Krisma, Tahbisan Imam, Perkawinan, Tobat, dan Pengurapan orang sakit (Embuiro, 1995). Namun Luther mengkritik tentang sistem sakramental yang menurutnya tidak bisa dibenarkan pada peran imam. Sakramen-sakramen bekerja *ex opera operantis* (secara harafiah berarti “melalui karya orang yang bekerja). Menurut Luther, orang akan memperoleh manfaat dari sakramen-sakramen hanya kalau mereka dilayani oleh iman yang setia (Noll, 1978).

Menanggapi pernyataan Luther, Gereja Katolik menegaskan bahwa sakramen-sakramen memang bekerja *ex opera operantis* (secara harafiah berarti “melalu karya orang yang bekerja). Namun lebih dari itu, sakramen-sakramen bekerja *ex opera operato* (secara harafiah berarti “melalui karya yang dikerjakan) (Naat, 2020). Gereja Katolik mengarisbawahi bahwa kemujaraban sakramen itu dipahami tidak bergantung pada kualitas pribadi dari seorang imam, tetapi pada kualitas yang melekat di dalam sakramen itu sendiri. Sakramen tetap mendatangkan rahmat Allah, karena sakramen itu sendiri adalah tanda dan sarana kehadiran Allah. Imam sebagai *ex opera operantis* disini adalah “pendukungn” (Alister, 1997). Apabila imam yang melayani sakramen adalah setia, kudus dan murni, hal ini akan semakin mempermudah rahmat Allah dalam sakramen itu. Sedangkan, bila imam tidak setia, kudus, dan murni, sakramen tersebut tetaplah menjadi sakramen yang sah, yang mendatangkan rahma dan anugerah karena sakramen berkerja *ex opera operato* berkerja “melalui karya yang dikerjakan” atau melalui sakramen itu sendiri. Namun demikian, Gereja Katolik menegaskan bahwa imam yang ideal melakukan pelayanan sakramen adalah imam yang setia, murni dan suci sebagaimana yang diungkapkan oleh Luther.

Bila seseorang berkata bahwa sakramen-sakramen dari hukum yang baru itu tidak memberikan *ex opera operato*, tetapi bahwa iman saja yang di dalam janji ilahi cukup untuk memperoleh anugerah, terkutuklah mereka. Alister, 1997).

Dengan semua argument yang diberikan, Gereja Katolik mendefinisikan bahwa sakramen merupakan sarana rahmat Allah yang memberikan kekuatan dan kehidupan rohani kepada umat, baik pelayan sakramen dan maupun oleh sakramen itu sendiri (Naat, 2020). Senada dengan ini, Alister mengatakan bahwa sakramen merupakan tanda kehadiran Allah dalam seluruh kehidupan manusia, baik dalam kepenuhan rahmat maupun dalam segala kekurangan atau keberdosaan manusia (Alister, 1997).

Dampak Konsili Trente

Konsili Trente adalah peristiwa yang amat penting dalam sejarah Gereja. Konsili ini mempunyai pengaruh yang vital terkait perkembangan ajaran dan peroganisasian struktur- institutional Gereja. Melalui konsili ini, Gereja Katolik berusaha membenah diri dari berbagai kelalaian, kelemahan dan kekurangan, serta memperjelas berbagai doktrin dan praktik-prsktik yang ada dalam Gereja (Eddy, 2008). Dalam hal ini, konsolidasi doktrin dan disiplin Gereja menjadi fokus utama dalam upaya memperjelas dan mempertegas kembali doktrin-diktrin yang ada dalam Gereja.

Beberapa contoh konsolidasi doktrin yang disuarakan guna memperkuat ajaran Katolik, seperti mengenai Kitab suci dan Tradisi, Sakramen, dan Ekaristi (Mangundapp, 2022, hlm. 57). Khususnya mengenai Ekaristi, Gereja mengemukakan bahwa memahami makna transubstansiasi dengan benar dalam ekaristi dapat membawa orang pada kemendalaman akan kehadiran Allah yang nyata dalam peristiwa ekaristi (Martsudjita, 2022). Tujuannya, orang menjadi mengerti (secara akal budi dan rasa) terkait apa yang sedang dirayakan. Bukan sebatas beriman, tetapi tidak mengerti apa yang diimani (*fides quaerens intellectum*). Konsolidasi doktrin ini untuk merespon pendapat Luther yang mengemukakan bahwa ajaran tentang transubstansiasi merupakan suatu hal yang absurd, semata-mata suatu usaha untuk merasionalkan misteri (Alister, 1997). Luther menolak untuk memahami peristiwa transubstansiasi karena menurutnya bukan ajaran tentang transubstansiasi yang harus dipercaya melainkan semata-mata karena Kristus Yesus benar-benar hadir di dalam Ekaristi (Budiman, 2006). Fakta ini lebih penting dari pada teori atau penjelasan lain apa pun.

Disamping itu, Konsili Trente juga memperkenalkan perubahan dalam disiplin Gereja dengan maksud memperbaiki kelemahan-kelemahan internal yang telah lama menjadi problem. Konsili Trente memperkuat regulasi mengenai moralitas, pelatihan dan tanggung jawab bagi para pemimpin Gereja guna mencegah terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan tidakkan korupsi (Budiman, 2006). Langkah yang diambil Gereja ini bertujuan untuk mengembalikan sekaligus meningkatkan kepercayaan dan integritas Gereja di mata umat, sehingga Gereja dapat kembali sebagai garam dan terang dunia.

Dalam ranah institutional, Konsili Trente secara definitif juga mendorong sentralisasi otoritas dibawah kekuasaan Paus. Sentralisasi ini berguna untuk mengurangi peran para uskup setempat yang kerap bertindak secara independen. Karena itu, Gereja berusaha mewujudkan keseragaman dalam praktik dan seluruh ajaran sehingga mencerminkan makna Gereja yang “satu, kudus, katolik dan apostolik.

Hubungan Gereja Katolik dan Kelompok Protestan

Sejak dimulainya Reformasi Protestan pada abad ke-16, hubungan antara Gereja Katolik dan kelompok Protestan telah menjadi salah satu tema paling kompleks dalam sejarah kekristenan. Reformasi, yang dipicu oleh tindakan Martin Luther yang menempelkan 95 tesisnya pada pintu Gereja Wittenberg pada tahun 1517, menandai pemisahan besar antara mereka yang tetap setia pada Paus dan tradisi Katolik dengan mereka yang menuntut perubahan mendasar dalam ajaran gereja yang dianggap menyimpang. Kejadian ini memicu konflik yang berlangsung lama, dengan dimensi teologis, politik, dan sosial yang saling terkait (Kirchberger, 2017). Meskipun hubungan antara Katolik dan Protestan diwarnai oleh ketegangan dan konflik tajam, ada pula upaya-upaya perdamaian yang terbatas.

Reformasi Protestan dimulai dengan kritik tajam Martin Luther terhadap praktik-praktik Gereja Katolik, seperti penjualan indulgensi. Luther menuntut agar otoritas Paus diakui dengan lebih tepat dan agar ajaran Kristen kembali berlandaskan pada Kitab Suci semata (*sola scriptura*) (Rukmana & Mareta, 2022). Penempelan 95 tesisnya bukan hanya menjadi sebuah kritik terhadap praktik yang dianggap sesat, tetapi juga merupakan dorongan untuk kembali pada prinsip-prinsip asli iman Kristen. Sebagai respons, Paus Leo X mengutuk ajaran Luther dengan bula *Exsurge Domine* pada tahun 1520, dan akhirnya mengeluarkannya dari gereja melalui ekskomunikasi pada tahun 1521 (Alister, 1997). Meskipun Luther adalah tokoh utama dalam Reformasi, gerakan ini juga melibatkan tokoh-tokoh lain seperti John Calvin dan Huldrych Zwingli, yang masing-masing membawa interpretasi dan ajaran berbeda mengenai iman Kristen. Gerakan Reformasi ini tidak hanya berpusat pada perbedaan teologis, tetapi juga membawa dampak politik dan sosial yang besar, memecah negara-negara Eropa menjadi dua kubu, Katolik dan Protestan (Sunarto dan Sejati, 2021). Di Inggris, misalnya, Raja Henry VIII memutuskan hubungan dengan Gereja Katolik Roma dan mendirikan Gereja Inggris (Anglikan) lebih karena alasan politik daripada teologis (Eddy, 2008). Ketegangan ini kemudian mencapai puncaknya dalam Perang Tiga Puluh Tahun (1618–1648), yang mengakibatkan kerusakan luar biasa di Eropa, dan baru dapat diselesaikan dengan Perjanjian Westphalia yang mengatur pembagian wilayah berdasarkan agama.

Perbedaan mendalam dalam pemahaman teologis menjadi inti dari perpecahan antara Gereja Katolik dan kelompok Protestan. Salah satu perbedaan utama adalah konsep keselamatan dan justifikasi (Eddy, 2008). Gereja Katolik mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh melalui iman kepada Kristus dan perbuatan baik, yang merupakan respons terhadap kasih karunia Tuhan. Dalam pandangan Katolik, keselamatan adalah proses yang melibatkan kerjasama antara kasih karunia Tuhan dan usaha manusia, yang diwujudkan melalui partisipasi dalam sakramen-sakramen gereja (Mawikere, 2017). Sebaliknya, kelompok Protestan, yang dipengaruhi oleh ajaran

Luther dan Calvin, mengajarkan sola fide (hanya iman), yang berarti keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman yang tulus kepada Kristus. Dalam pandangan Protestan, perbuatan baik bukanlah syarat untuk keselamatan, melainkan buah dari iman yang sejati. Ajaran ini menekankan bahwa kasih karunia Tuhan adalah satu-satunya cara untuk memperoleh keselamatan, dan manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri melalui usaha atau perbuatan mereka (Zai, 2021).

Selain itu, perbedaan dalam otoritas gereja dan Kitab Suci juga menjadi pembeda signifikan. Dalam teologi Protestan, sola scriptura adalah prinsip utama yang menekankan bahwa Kitab Suci adalah satu-satunya sumber otoritas dalam iman dan kehidupan Kristen. Protestan menghargai interpretasi pribadi terhadap Alkitab dan menolak adanya otoritas eksternal seperti Paus atau tradisi gereja yang dapat menambah atau mengubah ajaran Alkitab (Alister, 1997). Sebaliknya, Gereja Katolik mengajarkan bahwa otoritas tidak hanya berasal dari Kitab Suci, tetapi juga dari Tradisi Suci dan pengajaran Magisterium (otoritas gereja, termasuk Paus dan para uskup). Katolik percaya bahwa tradisi gereja yang diteruskan melalui ajaran Paus dan Konsili Gereja adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wahyu Tuhan, sehingga Paus dianggap memiliki otoritas untuk menafsirkan Kitab Suci dan menyampaikan ajaran yang benar kepada umat beriman.

Perbedaan lain yang mencolok adalah pemahaman tentang sakramen. Gereja Katolik mengakui tujuh sakramen yang dianggap sebagai sarana pengudusan bagi umat beriman, seperti Baptisan, Ekaristi, Penguatan (Konfirmasi), Tobat (Pengakuan Dosa), Perkawinan, Imamat, dan Penyembuhan Orang Sakit. Dalam pandangan Katolik, sakramen-sakramen ini adalah saluran rahmat yang penting bagi keselamatan, terutama dalam sakramen Ekaristi, di mana umat Katolik percaya bahwa roti dan anggur yang digunakan dalam perayaan Ekaristi benar-benar berubah menjadi tubuh dan darah Kristus melalui transubstansiasi (Naat, 2020). Namun, kelompok Protestan, yang dipengaruhi oleh ajaran Zwingli dan Calvin, hanya mengakui dua sakramen Baptisan dan Perjamuan Kudus yang mereka pandang lebih sebagai simbol atau tanda perjanjian, bukan sarana pengudusan yang efektif. Mereka menganggap sakramen sebagai tanda kasih karunia Tuhan yang sudah diterima oleh orang yang beriman, bukan jalan keselamatan itu sendiri.

Perbedaan teologis lainnya yang signifikan antara Katolik dan Protestan adalah penghormatan terhadap Maria dan orang-orang kudus. Gereja Katolik memberi penghormatan yang sangat tinggi kepada Maria, ibu Yesus, dan para orang kudus, yang dianggap sebagai perantara doa bagi umat manusia (Alister, 1997). Katolik mengajarkan bahwa Maria adalah "Perawan yang Tak Bernoda" dan berperan penting dalam doa-doa umat beriman. Sebaliknya, banyak kelompok Protestan menolak penghormatan terhadap Maria dan orang-orang kudus karena mereka menganggapnya sebagai bentuk penyembahan berhala yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Mereka berpendapat bahwa hanya Kristus yang menjadi perantara satu-satunya antara umat manusia dan Tuhan, sesuai dengan pengajaran dalam 1 Timotius 2:5.

Pola hubungan antara Gereja Katolik dan kelompok Protestan selama berabad-abad sangat dipengaruhi oleh perbedaan teologis dan politik yang mendalam. Sejak Reformasi, kedua kelompok ini terlibat dalam berbagai konflik, salah satunya adalah Perang Tiga Puluhan Tahun (1618–1648), yang menyebabkan kerusakan besar di Eropa (Eddy, 2008). Perang ini melibatkan negara-negara Katolik dan Protestan, dan baru berakhir dengan Perjanjian Westphalia yang mengakui kebebasan beragama serta mengatur pembagian wilayah berdasarkan agama. Meskipun konflik-konflik ini mendominasi hubungan mereka, ada juga upaya-upaya perdamaian yang terbatas. Pada abad ke-20, gerakan ekumenis membuka jalan bagi rekonsiliasi, dengan Konsili Vatikan II (1962–1965) menjadi tonggak penting dalam perubahan sikap Gereja Katolik terhadap kelompok Protestan (Denny Firmanto, 2023). Konsili ini mengeluarkan dokumen *Nostra Aetate*, yang menekankan pentingnya dialog antaragama dan saling menghormati antar denominasi Kristen.

Pada tahun 1999, langkah besar diambil dengan penandatanganan Dokumen Konsensus tentang Pengajaran Justifikasi antara Gereja Katolik dan Asosiasi Lutheran Dunia, di mana kedua belah pihak menyatakan kesepakatan mengenai ajaran tentang keselamatan dan pengampunan dosa (Denny Firmanto, 2023). Meskipun ini adalah pencapaian yang sangat berarti, perbedaan teologis yang mendalam tetap ada dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Sepanjang sejarah, hubungan antara Gereja Katolik dan kelompok Protestan telah melalui berbagai fase, dari konflik hebat pada masa Reformasi hingga upaya-upaya perdamaian dan rekonsiliasi di era modern. Meskipun perbedaan teologis yang mendalam tetap ada, terutama dalam hal keselamatan, otoritas gereja, sakramen, dan penghormatan terhadap Maria dan orang kudus, dialog ekumenis telah membawa perubahan signifikan (Batlajery, 2021). Kedua kelompok kini mampu bekerja sama dan saling menghormati, meskipun perbedaan-perbedaan itu tetap ada sebagai bagian dari keragaman iman Kristen. Upaya rekonsiliasi ini lebih

menekankan pada pentingnya persatuan dalam keragaman, dengan saling menghormati dan berkomitmen untuk memperjuangkan kebaikan bersama umat manusia.

Warisan Konsili Trente bagi Kekristenan

Konsili Trente (1545–1563) meninggalkan warisan yang sangat penting bagi Gereja Katolik modern, terutama dalam hal pembaharuan doktrin dan disiplin gereja (Eddy, 2008). Konsili ini diadakan sebagai respons terhadap tantangan Reformasi Protestan, menegaskan ajaran Katolik mengenai sakramen, keselamatan, dan otoritas gereja. Konsili ini memperkuat ajaran Katolik tentang keselamatan yang tidak hanya didapati melalui iman, namun juga melalui kerja sama manusia dengan rahmat Allah (Budiman, 2006).

Ajaran ini menggarisbawahi pentingnya perbuatan baik dan sakramen, khususnya baptisan, dalam proses justifikasi. Dalam doktrin *Extra Ecclesiam Nulla Salus* menyampaikan pula bahwa kebenaran yang tak dapat dibantahkan. Sebagai contoh dalam Yohanes 10:16 dikatakan bahwa “Ada lagi pada-Ku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini; domba-domba itu harus Kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suara-Ku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala”. Hal tersebut hendak mengatakan bahwa Gereja sebagai suatu kawanan yang terpilih tidak bersifat pilih kasih, melainkan istimewa, humanis, berwawasan luas, penuh cinta kasih dan dianugerahi dengan kebijaksanaan sejati (Saeng, 2015, hlm. 293).

Salah satu warisan signifikan adalah pembaharuan liturgi yang melahirkan Misa Tridentine. Misa Tridentine merupakan perayaan Ekaristi yang sudah lama dipakai dalam Gereja Katolik (Budiman, 2006). Misa ini juga merupakan bentuk misa ritus romawi yang ada dalam *Missale Romanum* atau buku misa romawi edisi umum. Misa ini merupakan misa yang paling umum digunakan di seluruh dunia, sehingga hampir semua negara misa ini digunakan dengan bahasa latin (Karundeng dkk., 2024, hlm. 75). Konsili juga menetapkan reformasi dalam Pendidikan imam, mendorong pendirian seminari untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan spiritual. Dalam dekrit *Optatum Totius*, dijelaskan pula bahwa seminari adalah tempat atau wadah bagi para seminaris untuk membentuk diri menjadi lebih baik agar benih panggilan yang ada dapat tumbuh subur. Pembinaan yang dilakukan tidak hanya berpusat pada bidang intelektual namun juga hidup spiritualitas yang meneladani hidup Kristus (Simbolon, 2008, hlm. 115). Dasar itulah yang mempengaruhi adanya seminari sebagai benih-benih panggilan.

Hasil Konsili Trente membantu membentuk identitas Katolik yang kuat dalam menghadapi tantangan eksternal dan memperkuat komitmen gereja terhadap pendidikan iman dan pelayanan pastoral (Budiman, 2006). Efek dari keputusan ini masih terasa dalam praktik keagamaan dan teologi Katolik saat ini, menjadikannya fondasi bagi berbagai reformasi di masa modern. Konsili ini bukan hanya memperkuat identitas Katolik dalam menghadapi Reformasi, tetapi juga meletakkan dasar bagi berbagai aspek kehidupan gereja yang bertahan hingga zaman modern. Dalam Gereja Katolik di Indonesia, konsili memberikan landasan yang kuat bagi komunitas Kristen dalam mencari dan menemukan identitas diri mereka sebagai sebuah komunitas Kristen yang memegang paham “seratus persen Katolik dan seratus persen Indonesia”. hal tersebut hendak mengatakan bahwa mengajak setiap umat untuk melaksanakan iman Kristen sesuai dengan budaya mereka masing-masing, dengan kata lain iman Kristen tidak terlepas dari budaya lokal dan identitas bangsa (Ranubaya dkk., hlm. 2024, hlm. 115).

Konsili Vatikan II (1962-1965) merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah Gereja Katolik yang membawa perubahan besar dalam pendekatan teologis, liturgi, serta hubungan dengan dunia modern (Putra et al., 2022). Konsili ini merupakan ide dan gagasan dari Paus Yohanes XXIII (Saramae, 2024, hlm. 31). Meskipun konsili ini digelar hampir empat abad setelah Konsili Trente (1545-1563), pengaruh Trente tetap terasa kuat, baik sebagai dasar maupun sebagai kontras dalam perkembangan doktrin dan praksis Gereja Katolik. Konsili Trente diadakan sebagai respons terhadap Reformasi Protestan yang mengganggu stabilitas Gereja Katolik di Eropa. Konsili ini memperkuat dogma Katolik dengan penekanan pada otoritas Gereja, sakramen, tradisi suci, serta perlunya reformasi internal untuk memberantas penyalahgunaan kekuasaan gerejawi. Doktrin-doktrin Trente seperti transubstansiasi, peran imam, dan pentingnya tradisi tetap menjadi fondasi teologi Katolik selama berabad-abad (Alister, 1997). Namun, pendekatan ini juga cenderung eksklusif dan defensif terhadap perubahan sosial dan teologis di luar Gereja.

Saat Konsili Vatikan II dibuka, Gereja menyadari perlunya pembaruan yang lebih mendalam dan sesuai untuk menghadapi tantangan dunia modern, seperti pluralisme agama, sekularisme, dan perkembangan teknologi. Paus Yohanes XXIII menghendaki Gereja yang hadir dalam dunia modern, dunia yang secara terus menerus berubah dengan cepat, kata *aggiornamento* kata kunci yang penting dalam konsili tersebut (Yewangoe, 2013, hlm.1).

Namun, banyak prinsip yang dikembangkan dalam Konsili Vatikan II tetap merujuk pada fondasi yang diletakkan oleh Konsili Trente. Misalnya, meskipun Vatikan II menekankan keterbukaan terhadap dunia luar melalui dokumen *Gaudium et Spes* dan mendorong dialog antaragama melalui *Nostra Aetate*, penghormatan terhadap tradisi dan sakramen yang ditegaskan oleh Trente tetap dipertahankan sebagai esensi identitas Katolik.

Selain itu, reformasi liturgi dalam Vatikan II, khususnya melalui *Sacrosanctum Concilium*, yang memperkenalkan penggunaan bahasa lokal dalam misa, menunjukkan adanya kesinambungan sekaligus keberanian untuk berinovasi. Liturgi tetap dianggap sakral seperti yang ditetapkan Trente, tetapi dengan penyampaian yang lebih mudah dipahami oleh umat, sehingga meningkatkan partisipasi aktif jemaat (R. Hardawiryana, 2009). Dalam Konsili Vatikan II, perubahan yang dilakukan nampak dalam sakramen Ekaristi dan liturgi. Hal tersebut nampak dalam misa diperbolehkan menggunakan bahasa pribumi, komuni dalam bentuk dua rupa dan konselebrasi dihidupkan kembali dalam misa yakni perayaan Ekaristi dapat dipimpin oleh beberapa Imam dan Uskup (Haryadi, 2016, hlm.119).

Dengan demikian, Konsili Vatikan II tidak sepenuhnya meninggalkan warisan dari Konsili Trente, melainkan menafsirkannya ulang dalam konteks baru yang sesuai dan relevan dengan situasi saat ini. Konsili Trente menyumbangkan dasar yang kokoh, sementara Konsili Vatikan II membuka jalan untuk penyesuaian yang lebih relevan bagi zaman modern, menunjukkan bahwa tradisi dan pembaruan dapat berjalan berdampingan dalam perjalanan Gereja Katolik.

PENUTUP

Simpulan

Reformasi Protestan yang dipelopori oleh Martin Luther mengguncang Gereja Katolik. Luther, melalui 95 dalilnya, menentang praktik penjualan indulgensi dan korupsi dalam Gereja, serta mengusulkan prinsip *sola fidei* (keselamatan melalui iman) dan *sola scriptura* (Kitab Suci sebagai satu-satunya sumber otoritas). Ajaran ini memicu perpecahan besar dalam Kekristenan Barat, di mana banyak pengikut Luther serta tokoh reformator lainnya seperti John Calvin dan Ulrich Zwingli mendirikan gereja-gereja baru. Selain persoalan doktrin, krisis internal Gereja, seperti nepotisme dan gaya hidup mewah para pemimpin gereja, semakin memperburuk keadaan dan mengurangi kepercayaan umat.

Sebagai respons, Gereja Katolik melakukan reformasi internal yang tercatat dalam Konsili Trente (1545–1563). Reformasi ini menekankan pembenahan moral para pemimpin gereja, pendirian seminari untuk pendidikan calon imam, serta penegasan doktrin Gereja, seperti pentingnya tradisi bersama Kitab Suci dan definisi sakramen. Konsili juga memperjelas ajaran tentang transubstansiasi dalam Ekaristi dan memperkuat otoritas paus sebagai pemimpin tertinggi. Langkah-langkah ini bertujuan mengatasi penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan integritas Gereja, dan memperbaiki kelemahan internal.

Hasil Konsili Trente menjadi tonggak penting dalam sejarah Gereja Katolik, menciptakan dasar yang kuat untuk menghadapi tantangan Protestan dan memperbaiki citra Gereja. Konsili ini menegaskan identitas Gereja Katolik yang berbeda dari Protestan, memperkuat regulasi moral, dan menyelaraskan praktik Gereja di seluruh dunia. Meskipun tidak menyatukan kembali Kekristenan, reformasi ini berhasil merevitalisasi Gereja Katolik dan mempertahankan peran spiritualnya di tengah masyarakat yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Batlajery, A. M. (2021), "Reformasi dan keesaan gereja: Makna peristiwa 31 Oktober bagi Gereja Protestan dan Katolik masa kini". *Jurnal Kurios*, 7(2), 352-363.
- Budiman, K. S. (2006). Aquinas, Konsili Trent, dan Luther Tentang Pembenaran oleh Iman : Sebuah Isu tentang Kontinuitas dan Diskontinuitas. *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan*, 7(2), 165–198. <https://doi.org/10.36421/veritas.v7i2.182>
- Denny Firmanto, A. (2023). Signifikansi Ekumenisme Dalam Perspektif Teologis Katolik. *Seri Filsafat Teologi*, 33(32), 122–143. <https://doi.org/10.35312/serifilsafat.v33i32.198>
- Embuir, H. (1995). *Katekismus Gereja Katolik*. Ende: Arnoldus.
- Haryadi, O. A. (2016). Pembaharuan Liturgi Ekaristi Konsili Vatikan II. Sapa: *Jurnal Kataketik Dan Pastoral*,

- Karundeng, F., Dedha, F. X., & Oroh, A. V. (2024). Misa Tradisional menurut Motu Proprio Traditiones Custodes. *Pineleng Theological Review*, 1(1), 74–82. <https://doi.org/10.53396/Pthr.V1i1.194>
- Kirchberger, G. (2017). “Latar Belakang, Warna Dasar, Dan Pengaruh Reformasi Protestan Tahun 1517”. *Jurnal Ledalero*, 16(2), 226–242.
- Kristiyanto, E. (2008). *Reformasi dan Dalam*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mangundapp, J. M. (2022). *Sacrosanctum Concilium: Penghayatan Ekaristi bagi umat beriman*. Sumatra Barat: Azka Pustaka
- Martasudjita, E. (2022). *Liturgi: Pengantar untuk Studi dan Praksis Liturgi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mawikere, M. C. S. (2017). Perbandingan Teologi Keselamatan Antara Katolik Dan Protestan Sebelum Dan Sesudah Gerakan Reformasi. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.46445/ejti.v1i1.52>
- McGrath, A. E. (1997). *Sejarah Pemikiran Reformasi*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Murniat, M., Fitriyana, N., & Hayati, S. (2021). Magisterium Sebagai Otoritas Tunggal Pengajar Dan Penafsir Kebenaran Gereja Katolik. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, 22(1), 97–113. <https://doi.org/10.19109/jia.v22i1.9022>
- Naat, D. E. (2020). Tinjauan Teologis-Dogmatis Tentang Sakramen Dalam Pelayanan Gerejawi. *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.36270/pengarah.v2i1.18>
- Noll, M. A. (1978). Martin Luther and the Concept of a “True” Church. *Evangelical Quarterly: An International Review of Bible and Theology*, 50(2), 79–85. <https://doi.org/10.1163/27725472-05002004>
- Putra, C. D., Firmanto, A. D., & Aluwesia, N. W. (2022). Konsili Vatikan Ii Serta Dampaknya Pada Karya Kongregasi Misi Provinsi Indonesia. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 23(1), 85–98. <https://doi.org/10.34150/jpak.v22i2.349>
- Ranubaya, F. A., Meo, Y. W. B. L., & Firmanto, A. D. (2024). Pengaruh Misi Gereja Katolik Paska Konsili Vatikan II di Keuskupan Ketapang. *Euntes : Jurnal Ilmiah Pastoral, Kateketik, Dan Pendidikan Agama Katolik*, 2(1), 46–64. <https://doi.org/10.58586/Je.V2i1.44>
- R. Hardawiryana, S. (2009). Sacrosanctum Concilium (Konsili Suci). *Dokumentasi Dan Penerangan KWI*, 521–653. <https://imavi.org/media/document/Seri-Dokumen-Gere>
- Rukmana, L., & Mareta, Y. (2022). Sejarah Pemikiran Gerakan Reformasi. *Jurnal EduSosial*, 2(2), 67–80. <https://doi.org/10.22437/jeso.v2i2.22405>
- Saeng, V. (2015). Konsili Vatikan II: Sebuah Revolusi Sunyi dan Pengaruhnya bagi Gereja Katolik Indonesia. *Seri Filsafat Teologi Widya Sasana*, 25(24), 289–312.
- Saramae, P. B. (2014). Konstitusi Liturgi Konsili Vatikan II: Prasejarah, Sejarah, dan Naskahnya. *Orientasi Baru*, 23(1), 31–56.
- Simbolon, S. (2008). Y- Generation Menjadi Imam?: Pendidikan Calon Imam Katolik di Indonesia dalam Terang Dekrit Optatum Totius. *Empirisma*, 27(2). <https://doi.org/10.30762/Empirisma.V27i2.1450>
- Tinambunan, E. R. L. (2017). Gerakan Reformasi Protestantisme Dalam Sejarah Gereja Katolik. *Studia Philosophica et Theologica*, 17(2), 99–126.
- Zai, E. A. (2021). Pengakuan dosa dalam pandangan agama kristen protestan dan kristen katolik. *Islam & Contemporary Issues*, 1(1), 53–58.
- Yewangoe, A. A. (2013). Konsili Vatikan II, 50 Tahun Kemudian. *Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero: Jurnal Ledalero*, 12(1), 1–9.